

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dilihat dari akar katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Dalam hal ini demokrasi bisa diartikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat”. Pada mulanya, dalam pemikiran Yunani demokrasi berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Pada dasar pemikiran modern, demokrasi diartikan sebagai ide politis-filosofis tentang Kedaulatan Rakyat. Hal ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subyek asli otoritas ini. Namun pada pemikiran modern ini ditambahkan persyaratan yaitu agar semua warga negara mampu menggunakan rasionya dan mempunyai suara hati. Dalam hal ini, hendaknya mereka sendiri, sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan serta dalam mengambil keputusan tentang masalah-masalah politik yang menjadi perhatian mereka.<sup>1</sup>

Demokrasi adalah suatu hal yang masih sangat relevan untuk terus dibicarakan hingga saat ini. Secara khusus di Indonesia, demokrasi seakan tiada hentinya untuk terus didiskusikan, terutama menjelang pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif dan presiden. Merefleksikan

---

<sup>1</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 154.

kembali demokrasi menjadi sangat penting melihat berbagai peristiwa yang memprihatinkan terkait pelaksanaan dan penerapan semangat demokrasi dalam masyarakat masih terus terjadi. Terjadinya demonstrasi besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 yang lalu, yang kemudian dikenal dengan istilah demonstrasi 411 yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam aksi lanjutan, terutama aksi pada tanggal 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal dengan istilah aksi 212, juga menjadi cerminan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Demonstrasi-demonstrasi tersebut menjadi sorotan karena dianggap sarat nuansa politis terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta. Demonstrasi yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama tersebut dipandang telah mencampuri urusan agama ke dalam situasi politik. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 4 November 2016, misalnya, dipandang sebagai aksi demonstrasi yang sarat nuansa politis karena ada yang berpandangan bahwa kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi tersebut telah ditunggangi aktor politik untuk melengserkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa saat ini.<sup>2</sup> Hal ini terjadi karena demonstrasi yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok tersebut terkesan dilakukan oleh kelompok yang pro salah satu pasangan calon yang menjadi lawan Ahok di pemilihan umum DKI Jakarta saat itu.

Seakan berkelanjutan dengan hal di atas, pada bulan Februari 2017 yang lalu, Presiden Joko Widodo berpidato dan mengatakan bahwa demokrasi di

---

<sup>2</sup>Alsadad Rudi, Fabian Januarius Kuwado, *Jokowi: Kerusuhan Usai Demonstrasi 4 November Ditunggangi Aktor Politik*, 5 November 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/00232741/jokowi.kerusuhan.usai.demonstrasi.4.november.ditunggangi.aktor.politik>, (diakses pada 10 November 2016 pukul 20.25 WIB).

Indonesia ini sudah kebablasan. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul Jawa Barat, 21 Februari lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi, seperti dikutip berbagai media, menyebutkan bahwa praktik demokrasi kita sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Bentuk nyata penyimpangan itu menurut Jokowi adalah politisasi SARA, yang menurutnya harus dihindari. Lebih lanjut Jokowi menyebutkan bahwa bertebarnya kebencian, kabar bohong, fitnah, saling memaki dan menghujat bisa menjurus kepada pecah belah bangsa.<sup>3</sup>

Kasus demonstrasi yang terjadi berjilid-jilid di DKI Jakarta seakan mulai mengusik ketenangan seluruh bangsa. Isu SARA sangat mencuat dalam ajang kontestasi pemilihan umum DKI Jakarta saat itu. Isu tersebut hingga kini masih sangat terasa. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dan pemilihan umum presiden tahun 2019 ini, isu-isu agama kembali mencuat. Hal ini bisa kita rasakan dalam perbincangan sehari-hari dalam berbagai media.

Isu mengenai cacatnya demokrasi juga mencuat saat terjadi penyerangan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tanggal 17 September 2017. LBH diserang oleh massa yang berasal dari beberapa organisasi. Penyerangan dilakukan dengan dalih ingin membubarkan acara yang sedang digelar di dalam

---

<sup>3</sup>(Tanpa nama penulis), *Demokrasi Indonesia, Apakah Memang Sudah 'Kebablasan?'*, 23 Februari 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571> (diakses pada 9 September 2017, pukul 10.00 WIB).

gedung itu. Pada Minggu malam, 17 September 2017 LBH Jakarta menggelar acara Seni AsikAsikAksi. Di dalamnya para aktivis, seniman, dan korban tragedi 1965 menonton beberapa acara seni seperti puisi dan musik. Sekitar pukul 21.30 WIB massa yang berkumpul di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat mulai berteriak-teriak untuk membubarkan acara yang ada di dalam. Massa yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Antikomunis ini menganggap acara tersebut merupakan bentuk kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>4</sup> Perwakilan LBH Surabaya Abdul Fatah mengatakan, pelarangan, penyerangan dan pembubaran diskusi pelurusan sejarah tahun 1965 di kantor YLBHI-LBH Jakarta, merupakan bentuk pengerdilan demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia dalam berkumpul dan berpendapat.<sup>5</sup>

Selain dalam ranah politik, demokrasi juga sangat berkaitan erat dengan ekonomi suatu negara. Apabila dalam suatu negara demokrasi hanya bisa dimiliki oleh golongan kaya saja, bukan tidak mungkin bahwa kaum miskin tidak akan memiliki kesempatan untuk bersuara dalam suatu negara. Hal ini bisa terjadi apabila kebebasan dalam demokrasi dipandang sebagai suatu kebebasan yang mutlak dan semua individu boleh melakukan apa saja dengan mengatasnamakan kebebasan dan kedaulatan rakyat. Dalam perdagangan, misalnya, apabila mengatasnamakan kebebasan lalu kelompok tertentu dapat menguasai pasar, maka bukan tidak mungkin kekuasaan ekonomi akan menciptakan suatu ketimpangan

---

<sup>4</sup>Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta>, (diakses pada 21 November 2017, pukul 17:40:50 WIB).

<sup>5</sup>Petrus Riski, *Aktivis HAM Jawa Timur Kecam Aksi Penyerangan Kantor YLBHI dan LBH*, 18 September 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-ham-jatim-kecam-aksi-penyerangan-kantor-ylbhi-dan-lbh/4033536.html>, (diakses pada 21 November 2017, pukul 17:38:54 WIB).

sosial dalam masyarakat. Hal ini sudah tampak dalam data Bank Dunia yang mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir ini pertumbuhan ekonomi hanya dikuasai oleh sekitar 20 persen orang terkaya Indonesia. Artinya, kebanyakan orang Indonesia tak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah pemusatan kekayaan yang tinggi. Artinya, sebanyak 10 persen dari 20 persen orang terkaya Indonesia memiliki 77 persen seluruh kekayaan negara Indonesia. Pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik mengalir hanya ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang didapat lebih besar. Padahal masih ada 11,3 persen atau 28 juta orang miskin di Indonesia. Selain itu, ada pula 26,9 persen atau 68 juta orang rentan miskin yang bisa jatuh miskin karena situasi ekonomi saat ini.<sup>6</sup>

Selain mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di atas, perenungan terkait demokrasi juga sangat relevan untuk dibahas mengingat adanya penurunan indeks demokrasi di tahun-tahun terakhir ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, dari hasil penelitian pada tahun 2016 yang lalu, indeks demokrasi Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 indeks demokrasi Indonesia mencapai 72,82 persen, sementara pada tahun 2016 indeks demokrasi Indonesia

---

<sup>6</sup>Nindias Nur Khalika, *Lingkaran Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, 26 Februari 2018, <https://tirto.id/lingkaran-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>, (diakses pada 8 April 2018, pukul 11.38 WIB).

turun menjadi 70,09 persen.<sup>7</sup> Penurunan ini terkait dengan kebebasan sipil yang dianggap masih kurangnya kebebasan berkumpul dan adanya diskriminasi.<sup>8</sup>

Dari berbagai hal di atas, penulis melihat bahwa peristiwa-peristiwa politik maupun ekonomi serta penurunan indeks demokrasi tersebut di atas bisa menjadi ancaman serius bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Dalam negara demokrasi, setiap orang memang diberi kesempatan untuk berpendapat, karena ini jelas menjadi bagian dari Kedaulatan Rakyat. Namun sikap dalam menyampaikan pendapat dan usaha untuk menyuarakan kepentingan juga perlu diperhatikan dengan bijaksana agar demokrasi sungguh-sungguh tercipta demi kebaikan bersama dan bukan semata-mata demi kepentingan kaum tertentu saja. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa memang ada hal yang belum terlaksana dengan baik terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini tampak karena kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam demokrasi yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan pendapat secara bijaksana demi kebaikan bersama seakan rawan untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi, namun ingin mencari keuntungan sendiri bagi pribadi atau kelompok.

Apabila kita melihat dalam sejarah pemikiran dalam ranah filsafat politik, khususnya dalam pemikiran modern, berbicara mengenai demokrasi atau mengenai politik, umumnya memang tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai

---

<sup>7</sup> (Tanpa nama penulis), *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi*, (Tanpa Tanggal Publikasi), <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html>, (diakses pada 13 April 2018, pukul 18:40:54 WIB).

<sup>8</sup> Abba Gabrillin, *Kebebasan Sipil Masih Menjadi Masalah dalam Indeks Demokrasi Indonesia*, 15 Desember 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/18524511/kebebasan-sipil-masih-jadi-masalah-dalam-indeks-demokrasi-indonesia>, (diakses pada 13 April 2018, pukul 18.44 WIB).

kebebasan, khususnya kebebasan individu. Dalam sejarah pemikiran filsafat modern, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pandangan politiknya yang selalu berawal dari pembahasan mengenai manusia, khususnya manusia yang bebas dan berdaulat atas dirinya sendiri. Seorang filsuf modern, yaitu Hobbes (1588-1679), misalnya, dia memaparkan bagaimana manusia sesungguhnya adalah sama, yaitu ingin mempertahankan kebebasannya sendiri dan ingin menguasai orang lain untuk menyelamatkan keinginannya sendiri. Dalam situasi seperti ini yang terjadi kemudian adalah perang semua melawan semua, sebab jumlah pemuas hasrat manusia terbatas tetapi hasrat manusia tidak terbatas. Namun, manusia juga akhirnya secara rasional bersepakat untuk tunduk pada otoritas sentral agar dapat memaksimalkan pengejaran hasrat dengan menyatukan diri dalam komunitas-komunitas yang kemudian tunduk pada otoritas sentral, yang dia sebut dengan Leviatan.<sup>9</sup>

Selain Hobbes, filsuf lainnya yang juga membahas mengenai kebebasan individu adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau berpandangan bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang juga menganggap dirinya tuan atas yang lainnya.<sup>10</sup> Hampir sama dengan Hobbes, Rousseau melihat bahwa kebebasan manusia bisa menghantar orang untuk berusaha mementingkan diri sendiri dan ingin menjadi penguasa atas orang lain. Maka dari itu, orang kemudian membutuhkan kontrak sosial agar bisa meletakkan kebebasannya masing-masing

---

<sup>9</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat, dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 723.

<sup>10</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia, hlm. 4.

di bawah supremasi kehendak umum, dan setiap individu harus menerima individu yang lain sebagai bagian dari kesatuan komunitas.<sup>11</sup>

Dari dua orang filsuf ini kita bisa menilai bahwa dalam kehidupan sebuah negara, masyarakat yang ada di dalamnya memang terbentuk dari setiap individu-individu. Individu-individu ini memang memiliki kebebasan dan kepentingan masing-masing. Namun, demi kepentingan masing-masing ini, orang kemudian mengikatkan diri pada kontrak sosial dan menaruh kepentingan pribadi ini di bawah kepentingan umum.

Berbicara mengenai demokrasi, termasuk demokrasi yang ada di Indonesia saat ini juga tidak bisa lepas dari pemahaman mengenai kebebasan ini. Demokrasi adalah sistem yang memberi ruang seluas mungkin bagi masyarakat mengekspresikan hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam filsafat politik, hak untuk menentukan diri sendiri ini disebut kedaulatan dan dalam konteks hidup bernegara umumnya dikenal sebagai Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat yang mana kekuasaan berada di tangan rakyat ini memang bisa menjadi dasar kebebasan berpendapat dalam demokrasi, dalam hal ini khususnya demokrasi di Indonesia. Namun dari berbagai fenomena yang terjadi, perlu untuk melihat kembali pemahaman masyarakat terkait Kedaulatan Rakyat ini. Jangan sampai setiap tindakan yang dilakukan atas nama Kedaulatan Rakyat, namun menjadikan orang kemudian menjadi bertindak semaunya sendiri dan mengintervensi kedaulatan rakyat yang lain. Hal ini akan membawa kita kembali kepada

---

<sup>11</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat, dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang.*, Op. Cit., hlm. 909.



kemunduran pemikiran. Dalam pemikiran politik modern orang kemudian menaruh kepentingannya sendiri dalam kontrak sosial demi kepentingan umum, maka jangan sampai kemudian akibat salah memahami makna Kedaulatan Rakyat ini orang justru mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi.

Selain mengenai kebebasan dan Kedaulatan Rakyat, masalah demokrasi di Indonesia juga terdapat dalam bidang ekonomi. Demokrasi seharusnya tidak melulu soal kebebasan dalam hal politik. Namun semangat demokrasi sendiri perlu kita terapkan guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hal ini juga masih belum bisa kita rasakan karena ketimpangan ekonomi masih sangat terasa di Indonesia. Apabila ketimpangan ekonomi masih terus terjadi, maka bisa kita prediksi bahwa orang-orang yang bisa berkuasa hanyalah orang-orang yang memiliki kekayaan finansial saja, dan orang miskin seakan tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat. Hal ini kembali menyangkut soal kedaulatan rakyat bahwa orang yang memiliki kedaulatan akhirnya hanya orang-orang yang kaya saja. Sementara orang miskin akan tetap berkulat dalam kemiskinannya tanpa bisa bersuara menyatakan pendapat.

Beranjak dari berbagai macam kasus di atas menarik niat penulis untuk merefleksikan kembali konsep demokrasi yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Terjadinya hiruk-pikuk di tengah masyarakat yang selalu mengatasnamakan demokrasi menimbulkan pertanyaan demokrasi seperti apa yang sesungguhnya yang ingin kita hidupi. Jangan sampai demokrasi yang selama ini kita pahami hanya sekedar dijadikan alat untuk menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini sangat relevan untuk dibahas melihat bahwa semakin hari

perkembangan demokrasi di Indonesia ini semakin mengkhawatirkan. Orang-orang yang mengatasnamakan Kedaulatan Rakyat dalam demokrasi dapat memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi untuk memprovokasi masyarakat yang lain yang akhirnya dapat memecah-belah bangsa. Munculnya pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan yang mengedepankan agama dalam politik juga sebagai wujud bahwa seakan-akan pemimpin yang pantas dipilih hanyalah dari golongan salah satu agama tertentu saja. Ini artinya makna kedaulatan rakyat tidak lagi dimaknai sebagai landasan untuk mencapai suatu kebaikan bersama bagi seluruh rakyat, namun seakan-akan kedaulatan rakyat hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja.

Sementara dalam hal ekonomi, apabila demokrasi hanya bisa digunakan untuk alat meraih kekuasaan saja, maka hanya akan ada kaum yang mampu saja yang berkuasa sementara kaum miskin tidak akan bisa bersuara. Maka dari itu bicara mengenai politik, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai ekonomi. Tujuan terbentuknya sebuah negara adalah menciptakan suatu kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Maka apabila kita semata-mata berbicara mengenai politik namun melupakan ekonomi, maka bukan tidak mungkin bahwa yang terjadi adalah kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu saja dalam masyarakat. Maka dari itu pembicaraan mengenai politik tidak boleh kita lepaskan dari pembicaraan mengenai ekonomi.

Menanggapi hal itu, penulis ingin merefleksikan kembali suatu konsep demokrasi yang dahulu telah disampaikan oleh salah satu pendiri bangsa ini, yaitu Mohammat Hatta dalam karyanya *Demokrasi Kita*. Dalam karya tersebut Hatta

berbicara secara khusus mengenai demokrasi yang sesuai dengan keadaan asli masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pemikir sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia, Hatta menghadapi persoalan mengenai tatanan seperti apa yang sesuai dan yang perlu diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka nantinya. Hatta dengan sadar memilih dan merancang demokrasi untuk membangun Indonesia yang merdeka. Lebih khusus lagi, demokrasi yang digagas Hatta bersifat sosialis, yaitu pengertian yang mengingatkan kita pada paham sosialisme demokrasi yang berkembang di negara-negara Barat sejak paruh kedua abad ke-19. Namun, demokrasi yang digagas oleh Hatta berbeda dengan demokrasi yang ada di Barat, termasuk dengan paham demokrasi sosial ini. Pemikiran demokrasi Hatta ini berangkat dari sikapnya yang kritis namun juga rasional terhadap demokrasi Barat. Hatta tidak menolak sepenuhnya demokrasi Barat, namun juga tidak menerima sepenuhnya demokrasi Barat.<sup>12</sup>

Menanggapi mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang marak terjadi dalam berbagai macam fenomena yang penulis paparkan di atas, hal itu memang terkait dengan sistem pemerintahan yang mana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Namun perlu dipahami lagi mengenai makna Kedaulatan Rakyat ini. Kedaulatan Rakyat, menurut Hatta, sering dipahami bahwa tiap-tiap golongan boleh bertindak dengan sekehandaknya. Hal ini terjadi ketika orang semata-mata melihat bahwa kedaulatan

---

<sup>12</sup>Zulkifri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 6-7.

rakyat berarti kekuasaan sungguh berada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari pemerintahan. Dengan demikian akhirnya orang berpikir bahwa rakyat boleh melakukan apa saja terkait perasaan dan tindakan yang sesuai dengan paham dalam golongannya karena golongannya adalah bagian dari rakyat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya suatu kedaulatan yang masing-masing dilakukan oleh rakyat sesuai dengan pemahamannya masing-masing.<sup>13</sup>

Terkait dengan hal itu, Hatta melihat bahwa penyebabnya adalah rakyat masih belum mengerti benar akan kedudukan kedaulatan rakyat. Ini mengakibatkan rakyat mudah terpengaruh oleh anjuran untuk mengacaukan negara, maka dalam hal ini Hatta melihat bahwa perlu dan wajib bagi para pemangku negara untuk memberi penjelasan kepada rakyat secara terang-terangan tentang arti dan maksud dari kedaulatan rakyat.<sup>14</sup>

Selain terkait dengan Kedaulatan Rakyat, Hatta juga berpendapat bahwa demokrasi, yang awal mulanya muncul dari Barat, memiliki tujuan yang mulia, yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan sebagaimana yang disemboyankan Revolusi Perancis tahun 1789. Namun menurut Hatta demokrasi Barat ini dalam penerapannya telah mengingkari prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*) yang digaungkan itu. Demokrasi Barat yang menjunjung paham liberalisme telah memuja kebebasan individu, yaitu kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman individual.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lih. Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Bandung: Segi Arsy, 2014, hlm. 8.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.9.

<sup>15</sup>Zulkifri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta, Op. Cit.*, hlm. 7-9.

Dalam karyanya *Demokrasi Kita*, Hatta melihat bahwa paham demokrasi Barat yang bersifat individualis tidak sesuai dengan keadaan asli masyarakat Indonesia yang berakar dari kehidupan desa yang masih bersifat kolektivisme. Dalam kolektivitas masyarakat asli Indonesia itu Hatta melihat bahwa kedaulatan rakyat dapat meliputi demokrasi dalam bidang politik dan juga ekonomi.<sup>16</sup> Terkait dengan demokrasi ekonomi, Hatta menekankan semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial, yang dipandang sebagai dasar yang baik untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Keyakinan tatanan bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini juga bisa membangun segi sosial masyarakat untuk menjamin perkembangan kepribadian manusia. Hal ini guna mencapai manusia yang bahagia dan sejahtera, serta susila, yang sesungguhnya menjadi tujuan sebuah negara.<sup>17</sup>

Dari pandangan demokrasi Hatta ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi memang tidak semata-mata menjadi alasan untuk suatu kebebasan namun juga menjunjung nilai kolektivisme. Memaknai dan memahami dengan tepat arti Kedaulatan Rakyat serta menjunjung nilai kolektif dalam ekonomi adalah jalan mencapai demokrasi yang baik. Apabila kita melihat realitas sekarang ini, kita bisa memahami betapa pentingnya demokrasi, bukan hanya dalam bidang politik, namun juga dalam bidang ekonomi.

---

<sup>16</sup>Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>17</sup> Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 436-437.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, pertanyaan yang hendak dijawab dalam skripsi ini ada satu hal, yaitu “Bagaimana konsep Demokrasi menurut Mohammad Hatta dalam *Demokrasi Kita?*”

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Melalui penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk :

1. Memperdalam pemahaman mengenai konsep demokrasi menurut Muhammad Hatta.
2. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan program studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

## **1.4. METODE PENULISAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (studi pustaka) yang sekaligus menjadi metode penulisan skripsi ini. Studi pustaka difokuskan pada usaha memahami konsep demokrasi dalam pemikiran Mohammad Hatta. Untuk itu, penulis menggunakan buku Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Bandung: Segarsy, 2014 sebagai sumber utama. Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode interpretasi dan meta analisis.

Metode interpretasi berarti berusaha untuk mencapai pemahaman dari apa yang dipelajari.<sup>18</sup> Sedangkan metode meta analisis adalah suatu teknik penelitian yang menggabungkan dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Dilihat dari prosesnya, meta-analisis merupakan suatu studi yang bersifat observasional retrospektif, dalam artian peneliti membuat rekapitulasi data tanpa melakukan manipulasi eksperimental.<sup>19</sup> Maka selain buku sumber utama, penulis juga akan menggunakan beberapa karya Mohammad Hatta dan buku-buku yang berbicara mengenai pemikiran tersebut sebagai pustaka pendukung sumber utama bagi penulis.

## 1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beragam sumber tinjauan pustaka yang akan digunakan penulis dalam melakukan penulisan ini, yang pertama adalah buku Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Bandung: Segi Arsy, 2014. Dalam buku ini Hatta secara tuntas membahas mengenai demokrasi yang dipandang cocok untuk Indonesia. berdasarkan pada pengalaman Hatta yang memandang bahwa demokrasi Barat telah mengarah pada individualisme, maka Hatta menyarankan suatu konsep demokrasi yang bersendikan pada susunan masyarakat desa di Indonesia yang asli. Dalam desa

---

<sup>18</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 42.

<sup>19</sup> (tanpa nama penulis), (tanpa judul), <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2015-1-01793-MN%20Bab2001.pdf>, (diakses pada 02 Mei 2018, pukul 22.20 WIB).

Indonesia yang asali, segala peraturan yang mengenai kepentingan hidup bersama diputuskan dalam suatu musyawarah untuk mufakat, yang biasanya dilakukan dalam rapat desa. Maka dalam hal ini, mengambil suatu keputusan secara mufakat dengan musyawarah adalah dasar dari demokrasi politik menurut Hatta.<sup>20</sup> Selain itu, segala persoalan dan usaha yang berat dalam masyarakat desa, yang tidak mampu dipikul secara individu, akan menjadi usaha bersama dengan dikerjakan secara tolong-menolong. Dalam hal ini tolong menolong dan gotong royong adalah sendi yang bagus bagi Hatta untuk menegakkan demokrasi dalam bidang ekonomi. Masyarakat Indonesia yang asali adalah masyarakat yang memiliki semangat kolektivisme. Hal ini berbeda dengan masyarakat Barat yang cenderung bercirikan individualisme. Maka dari itu demokrasi yang cocok untuk Indonesia menurut Hatta adalah demokrasi yang meliputi demokrasi dalam bidang politik maupun ekonomi.<sup>21</sup>

Meskipun dasar daripada demokrasi Indonesia adalah demokrasi politik dan ekonomi, namun Hatta secara lebih rinci membahas mengenai konsep demokrasinya itu dalam sebuah karyanya Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1*, Jakarta: LP3ES, 2000, yang menjadi tinjauan kedua bagi penulis dalam melakukan penulisan ini. Dalam karya ini, secara khusus dalam tulisannya mengenai *Demokrasi Kita*, Hatta membahas mengenai tindakan-tindakan Presiden Soekarno yang dilihatnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini karena Soekarno mengangkat dirinya sendiri menjadi

---

<sup>20</sup>Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 63.



formatif kabinet. Hal ini kemudian diteruskan Soekarno dengan membubarkan konstitusi yang dipilih oleh rakyat dan pada akhirnya Soekarno menyusun suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru yang sesuai dengan konsepsinya sendiri.<sup>22</sup> Dalam Karyanya itu pula, Hatta kemudian membahas mengenai tugas dari perwakilan rakyat, terjadinya krisis demokrasi, pelaksanaan demokrasi hingga konsep demokrasi Indonesia yang diajukannya. Dalam konsep demokrasi yang diajukannya, Hatta berpendapat bahwa demokrasi harus berkembang, yaitu mendasarkan semangat kolektivisme masyarakat asli Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan jalan demokrasi, kita mengharapkan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada tiga hal yang penting yang mempengaruhi semangat demokrasi Indonesia dari sudut pandang Hatta. Pertama adalah pengaruh demokrasi Barat yang memiliki tujuan asalnya yaitu perikemanusiaan.<sup>24</sup> Meskipun demokrasi Barat akhirnya tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia karena efeknya yang memunculkan tatanan kapitalisme. Kedua adalah ajaran Islam yang menuntut keadilan Ilahi dalam masyarakat serta menjunjung persaudaraan yang antar makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. Ketiga

---

<sup>22</sup> Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2, Op. Cit.*, hlm. 426-427.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 434.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

adalah berpegang pada kehidupan asali masyarakat Indonesia yang berciri kolektivisme.<sup>25</sup>

Paham demokrasi Hatta ini sesungguhnya berawal dari pemikiran dan refleksinya mengenai demokrasi yang ada di Barat. Hal ini diungkapkan dalam buku Zulkifri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010, yang juga menjadi tinjauan pustaka penulis dalam tulisan ini. Dalam buku ini dijelaskan latar belakang pemikiran politik Hatta. Demokrasi yang digagas Hatta adalah demokrasi yang bersifat sosialis, yaitu pengertian yang mengingatkan kita pada paham sosialisme demokrasi yang berkembang di negara-negara Barat sejak paruh kedua abad ke-19. Namun, demokrasi yang digagas oleh Hatta berbeda dengan demokrasi yang ada di Barat, termasuk dengan paham demokrasi sosial ini. Pemikiran demokrasi Hatta ini berangkat dari sikapnya yang kritis namun juga rasional terhadap demokrasi Barat. Hatta tidak menolak sepenuhnya demokrasi Barat, namun juga tidak menerima sepenuhnya demokrasi Barat.<sup>26</sup> Paham demokrasi Barat ini kemudian hanya menjadi inspirasi saja bagi Hatta, namun tidak diterapkan secara penuh di Indonesia.

Selain menggunakan tinjauan pustaka yang membahas secara spesifik pemikiran politik dan demokrasi Hatta, dalam hal ini penulis juga menggunakan sumber lain yang membahas mengenai biografi dari Mohammad Hatta. Dalam buku Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012, disajikan gambaran singkat mengenai perjalanan hidup Hatta dan menguraikannya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

<sup>26</sup> Zulkifri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta, Op. Cit.*, hlm. 6-7.

dari berbagai macam sisi. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai masa kecil Hatta di Bukit Tinggi dan di Padang. Dari sumber ini kita bisa mengetahui latar belakang Hatta sebagai seorang anak pedagang yang belajar mengenai ekonomi<sup>27</sup> yang kemudian juga bisa menjadi dasar pemikirannya mengenai ekonomi.

Untuk melihat latar belakang dan relevansi dari pembahasan mengenai demokrasi ini, penulis juga akan menggunakan tinjauan pustaka dari berbagai sumber dari internet. Penulis akan melihat mengenai berbagai macam peristiwa demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Demonstrasi-demonstrasi tersebut berkaitan erat dengan pembahasan ini karena ada yang menduga ada muatan politik tertentu dalam aksi demonstrasi tersebut.<sup>28</sup> Selain itu penulis juga menggunakan ungkapan dari Presiden Jokowi yang menilai bahwa adanya kebebasan dalam demokrasi.<sup>29</sup> Penulis juga akan melihat bagaimana pengkerdilan demokrasi dengan adanya penyerangan kantor LBH di Jakarta sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan berpendapat,<sup>30</sup> dan adanya ketimpangan sosial sebagai contoh bahwa belum adanya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>31</sup> Selain itu,

---

<sup>27</sup> Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 9.

<sup>28</sup> Alsadad Rudi, Fabian Januarius Kuwado, *Jokowi: Kerusuhan Usai Demonstrasi 4 November Ditunggangi Aktor Politik*, 5 November 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/00232741/jokowi.kerusuhan.usai.demonstrasi.4.november.ditunggangi.aktor.politik>, (diakses pada 10 November 2016 pukul 20.25 WIB).

<sup>29</sup>(Tanpa nama penulis), *Demokrasi Indonesia, Apakah Memang Sudah 'Kebebasan?'*, 23 Februari 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571> (diakses pada 9 September 2017, pukul 10.00 WIB).

<sup>30</sup> Tempo.co, *Detik-Detik Penyerangan Kantor LBH Jakarta*, 18 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/910039/detik-detik-penyerangan-kantor-lbh-jakarta>, (diakses pada 21 November 2017, pukul 17:40:50 WIB).

<sup>31</sup>Nindias Nur Khalika, *Lingkar Setan Ketimpangan Sosial di Indonesia*, 26 Februari 2018, <https://tirto.id/lingkar-setan-ketimpangan-sosial-di-indonesia-cFhB>, (diakses pada 8 April 2018, pukul 11.38 WIB).

turunnya indeks demokrasi Indonesia<sup>32</sup> juga menjadi tinjauan pustaka bagi penulis untuk melihat bahwa memang pembahasan mengenai demokrasi ini masih sangat relevan di Indonesia.

## 1.6. SKEMA PENULISAN

Dalam penulisan Skripsi ini penulis memakai skema penulisan sebagai berikut:

### Bab I      Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang pemilihan tema, tujuan penulisan, rumusan masalah yang akan dijawab, metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, dan skema penulisan.

### Bab II Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran Mohammad Hatta

Bab ini penulis bagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, riwayat hidup; kedua, karya-karya Hatta; dan ketiga, latar belakang pemikiran Mohammad Hatta. Secara khusus, penulis menekankan pada proses hidup Mohammad Hatta hingga perjalanan intelektualnya beserta pokok-pokok pemikirannya, terutama biografi politiknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya pemikiran demokrasi Mohammad Hatta.

### Bab III Demokrasi Menurut Muhammad Hatta dalam Karya *Demokrasi Kita*

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah utama dalam karya tulisan ini, yaitu mengenai bagaimana konsep demokrasi menurut

---

<sup>32</sup> (Tanpa nama penulis), *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi*, (Tanpa Tanggal Publikasi), <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html>, (diakses pada 13 April 2018, pukul 18:40:54 WIB).

Mohammad Hatta dalam karyanya *Demokrasi Kita*. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan dipaparkan dalam tiga bagian. Bagian pertama, penulis akan membahas mengenai latar belakang penulisan buku *Demokrasi Kita*. Dalam bagian ini penulis akan memaparkan tentang situasi politik Indonesia pada saat penerapan sistem demokrasi terpimpin yang kemudian dikritik oleh Hatta, yang tertuang dalam buku ini. Kedua, penulis akan membahas mengenai konsep Kedaulatan Rakyat, yaitu bagaimana makna Kedaulatan Rakyat yang dipikirkan oleh Hatta. Sementara yang ketiga, penulis akan membahas mengenai pemikiran Hatta mengenai demokrasi.

#### Bab IV Penutup

Pada bab keempat ini penulis akan memaparkan dua hal terkait dengan penutup bagian tulisan ini. Bagian pertama penulis akan memaparkan mengenai relevansi, sumbangan pemikiran, dan tanggapan kritis terkait tulisan ini. Dalam hal ini penulis akan membahas beberapa kasus yang telah penulis paparkan dalam bab I, khususnya di bagian latar belakang tulisan ini dan melihat kasus tersebut dalam sudut pandang demokrasi Mohammad Hatta, serta penulis akan menanggapi masalah tersebut secara kritis. Dalam bagian kedua, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep demokrasi Mohammad Hatta dalam karya *Demokrasi Kita*. Kesimpulan ini akan penulis paparkan dengan merujuk pada rumusan masalah yang penulis paparkan dalam bab pertama tulisan ini.